

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan perihal mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penelitian ini menarik untuk dilaksanakan. Perumusan masalah menjelaskan mengenai butir-butir permasalahan yang akan dicarikan jalan penyelesaiannya. Tujuan penelitian membahas mengenai hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, dengan tercapainya tujuan penelitian ini, tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian. Sistematika penulisan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penulisan laporan penelitian yang berbentuk skripsi.

1.1. Latar Belakang

Fraud (Kecurangan) saat ini tidak asing lagi terdengar dan semakin merajalela. Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih dan modern-nya alat elektronik saat ini, semakin banyak pula kasus-kasus kecurangan yang ada di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan segala jenis kejahatan. Kecurangan adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain.

Berbagai macam kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di perusahaan maupun lembaga pemerintahan tidak jarang disebabkan karena faktor

pengendalian intern yang lemah. Tindak kecurangan yang semakin sering terjadi disebabkan oleh pelaku kecurangan semakin pandai menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya. Bahkan praktik kecurangan sudah dikemas dengan terencana oleh jajaran manajemen perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Namun kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan ataupun lembaga pemerintahan mulai terdeteksi dan terbongkar berkat peran aktif auditor dan *whistleblower*.

Pada praktiknya, meskipun internal audit dan pengendalian intern sebuah manajemen perusahaan atau lembaga pemerintahan sudah dirancang dengan baik belum tentu mampu menjamin bahwa perusahaan atau lembaga pemerintahan tersebut terlepas dari bentuk kecurangan. Banyak masalah yang menjadi penyebab timbulnya kecurangan di perusahaan atau lembaga pemerintahan diantaranya perilaku karyawan/pegawai, pemborosan, dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yang merupakan bentuk fraud.

Dalam mendeteksi kecurangan perlu didukung kemampuan auditor diantaranya kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional. Auditor harus mempunyai kemampuan tersebut untuk menemukan adanya indikasi kecurangan yang kemungkinan terjadi. *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* (1983) dalam Efendy (2010:18) mendefinisikan kompetensi sebagai keterampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Auditor harus dituntut memiliki pengetahuan dan pengalaman audit untuk mencapai kompetensi profesionalnya dalam pemeriksaan.

Fraud diterjemahkan sebagai kecurangan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.70. Selain itu, *fraud* berbeda dengan kekeliruan (*error*) dalam hal tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001:316.2). Menurut laporan *2002 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuse* yang diterjemahkan oleh Pertiwi (2010:3), aktivitas internal auditor dapat menekan 35% terjadinya *fraud*. Disinilah pentingnya adanya pengendalian intern dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan dimana peran seorang internal auditor, dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dapat berperan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan pada lembaga atau perusahaan ia bekerja. Oleh karena itu, untuk dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan internal auditor harus memiliki keahlian sebagai eksistensi dari keterampilan dan pengetahuan mengenai gejala pasti dalam mengindikasikan kecurangan dan keahlian untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Faktor keahlian lain yang berpengaruh dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan adalah pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan di Indonesia berdasarkan SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008. Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan namun juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Tentu tidak mengherankan apabila cara pandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor yang berpengalaman dan

auditor yang kurang berpengalaman berbeda. Auditor yang sudah memiliki pengalaman audit diyakini mampu mendeteksi kecurangan karena pengalamannya dalam menghadapi berbagai kasus peristiwa yang wajar maupun tidak wajar. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor semakin besar kemampuan auditor dalam mengatasi dan menganalisis masalah berikut penyelesaiannya.

Kasus kecurangan Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu bukti nyata kerugian dari *fraud* yang dilakukan oleh manajemen. Bermula pada tahun 2009 Kemempora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) yang melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional tersebut menuai permasalahan. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan terkait penyebab kecurangan yang dilakukan manajemen yaitu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan proyek tersebut. Penyimpangan wewenang itu terjadi pada proses pengurusan hak atas tanah, proses izin pembangunan, proses pelelangan, proses persetujuan RAK K/L dan persetujuan tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran, dan aliran dana yang di ikuti dengan rekayasa akuntansi. Penyimpangan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 463,67 miliar. Kasus kecurangan lainnya terjadi pada Bank Century yang hingga kini belum tuntas. Kasus ini muncul akibat adanya indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh manajemen terhadap pembengkakan kucuran dana talangan pada Bank Century yang mencapai Rp 6,76 triliun.

Berbagai pertanyaan diajukan terhadap kasus-kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana manajemen dengan mudah melakukan praktik kecurangan yang memperkaya pribadi atau organisasinya. Apakah penyimpangan yang terjadi diungkap oleh tim penyidik baik auditor maupun aparaturnya penegak hukum telah dilakukan secara benar, tepat dan profesional. Kualitas laporan hasil pemeriksaan atas kecurangan yang terjadi tergantung pada kompetensi dan obyektifitas auditor dan aparaturnya penegak hukum.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi obyektifitas auditor, dengan serangkaian ketentuan, profesi auditor harus independen dalam melakukan audit. Setyaningrum (2010:43) menyatakan bahwa dalam hubungan antara independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan ditinjau dari aspek-aspek independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya. Aspek ini disebut dengan independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*, artinya seorang auditor harus mengungkapkan tentang temuan apa yang didapat dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen apakah laporan keuangan terjadi suatu kesalahan atau ketidakberesan sesuai dengan temuan atau fakta yang ada. Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor jadi dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun.

Setyaningrum (2010:5) menyatakan bahwa dengan adanya independensi, mereka mampu menarik kesimpulan dan memberikan opini yang tidak memihak. Dan hal ini membawa pengaruh pada hasil laporan keuangan auditan suatu

perusahaan atau manajemen menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Rachmawati (2014:3) memberikan contoh kasus terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah badan usaha milik Negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapeppam (Bapeppam, 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan salah saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihi sajian penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT. Kimia Farma per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT. Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor. Auditor yang mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma per 31 Desember 2001, Bapeppam menyimpulkan auditor telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT. Kimia Farma menggelembungkan keuntungan. Bapeppam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT. Kimia Farma. Atas temuan ini, Kepada PT. Kimia Farma Bapeppam memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 500 juta, Rp 1 milyar terhadap direksi lama PT Kimia Farma dan Rp 100 juta kepada auditor yang menangani (Bapeppam 2002).

Permasalahan yang menimbulkan pertanyaan disini, mengapa auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan seperti yang dicontohkan di atas. Mestinya bila auditor yang bertugas pada audit atas perusahaan atau manajemen ini menjalankan audit secara tepat dan profesional termasuk dalam hal pendeteksian kecurangan maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang merugikan ini.

Auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya. Kepercayaan ini senantiasa harus selalu ditingkatkan dengan didukung oleh keahlian audit. Tanggung jawab sebagai auditor harus dapat dilaksanakan dengan sikap profesionalisme serta menjunjung tinggi kode etik profesi yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap tugasnya. Mengingat peran dari auditor yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia usaha, peningkatan profesional auditor sangat penting untuk terus dilakukan dan auditor harus terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan. Berdasarkan Standar audit berbasis ISA (*International Standar on Auditing*), auditor wajib mematuhi semua ISAs yang relevan dengan audit. Suatu *International Standar on Auditing* adalah relevan dengan audit jika *International Standar on Auditing* sudah berlaku dan situasi yang ditangani *International Standar on Auditing* memang ada (Tuanakotta, 2012:122) .

Pengalaman auditor diyakini juga dapat mempengaruhi tingkat skeptisisme seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan

penugasan audit di lapangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan. Semakin banyak auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisisme yang dimiliki. Untuk itu, seorang auditor harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan auditor senior yang lebih berpengalaman (Isalinda, 2011:7). Pengalaman membantu auditor dalam memprediksi dan mendeteksi masalah yang dihadapi secara profesional.

Seorang auditor harus memiliki sikap skeptisisme untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Standar professional akuntan publik mendefenisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2001). Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit (Khushasyandita, 2012:2).

Untuk menerapkan skeptisisme profesional yang efektif, perlu dibentuk persepsi bahwa bahkan sistem pengendalian internal yang paling baik memiliki celah, dan memungkinkan terjadinya *fraud* (Center for Audit Quality, 2010) dalam Djohar (2012:10). Hanya saja dalam menerapkan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen melakukan praktik yang bersih, namun tidak juga berprasangka bahwa manajemen melakukan fraud.

Menurut Loewers (2011) dalam Djohar (2012:10) skeptisisme profesional adalah kecenderungan auditor untuk tidak menyetujui asersi manajemen tanpa bukti yang menguatkan, atau kecenderungan untuk meminta manajemen memberikan fakta atas asersinya (disertai bukti).

Seperti yang tercantum dalam Audit Berbasis ISA (*International Standards on Auditing*) oleh Tuanakotta (2012:321), Skeptisisme profesional merupakan kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan. Dalam *International Standards on Auditing 200* (IAASB, 2009) ditekankan pentingnya skeptisisme profesional. Disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan proses audit berlandaskan skeptisisme profesional dengan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan. Pekerjaan auditor selalu berhubungan dengan pembuktian dan pencarian kebenaran bukti-bukti dari dokumen dan kertas kerja, dan dari prosedur standar yang mereka audit, namun dalam hal ini bukan berarti auditor hanya bekerja untuk memenuhi prosedur standar yang ada, terutama saat ditemukannya bukti-bukti yang penting (Peurseum, 2010) dalam Djohar (2012:12), karena tanpa keberanian untuk beradu argumentasi mengenai asersi manajemen, auditor tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan pendeteksi *fraud* (*Financial Reporting Council*, 2010). Untuk itu auditor harus mampu menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh SEC (*Securities and Exchange Commission*) menemukan bahwa urutan ketiga dari penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisisme profesional yang kurang memadai. Dari 40 kasus audit yang diteliti

SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai (Beasley, carcello & Hermanson, 2001) dalam Aulia (2013:11). Jadi rendahnya tingkat skeptisisme profesional dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan. Kegagalan ini selain merugikan secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi auditor di mata masyarakat. kurangnya sumber daya auditor yang berkualitas akan berakibat kepada sulitnya dalam pengungkapan berbagai jenis kasus kecurangan. Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesional yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Selain faktor manajemen dan pengendalian intern yang lemah, kecurangan juga dapat disebabkan karena tiga hal yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran atas tindakan (*rationalization*), ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah *The Fraud Triangle* (Albrecht, 2008; Singleton, 2010). Tekanan yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Sedangkan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang mengacu kepada kode etik personal. Pelanggaran terhadap kode etik, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan inti dari tindakan kecurangan akuntansi. Semakin banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kecurangan maka akan semakin banyak pula kasus kecurangan yang dapat terjadi di suatu perusahaan. Resiko perusahaan mengalami kerugian pun juga akan semakin besar.

Menanggapi besarnya resiko yang ditimbulkan oleh kecurangan beserta

dampak kerugian lainnya, maka perusahaan atau manajemen perlu untuk meningkatkan fokus perhatiannya terhadap upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Sebagai langkah pencegahan dan pendeteksian kecurangan tersebut, baik auditor internal, eksternal maupun aparaturnya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keahlian, memiliki sikap integritas moral yang tinggi, independen dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya.

Berdasarkan beberapa penelitian, kebijakan maupun metode yang dapat diterapkan oleh auditor untuk mendeteksi kecurangan berbeda-beda pada tiap perusahaan atau manajemen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2010:121) menyebutkan keahlian auditor diantaranya pengetahuan, ciri-ciri psikologis, kemampuan berfikir, penentuan keputusan, perilaku etis, analisis tugas, dan pengalaman auditor adalah unsur-unsur yang harus dimiliki auditor dalam upaya pendeteksian dan pencegahan kecurangan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Strategi penentuan keputusan, analisis tugas, dan perilaku etis merupakan unsur yang memberikan pengaruh nyata terhadap pendeteksian kecurangan sedangkan unsur ciri-ciri psikologis, kemampuan berfikir, dan pengalaman tidak begitu berpengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan memiliki serta menjunjung tinggi perilaku yang etis sebagai auditor sehingga dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*). Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Aulia (2013:98) menjelaskan skeptisisme profesional memiliki pengaruh paling besar dibanding pengalaman dan independensi untuk mendeteksi kecurangan. Auditor harus menerapkan sikap skeptisisme profesional pada saat mengajukan pertanyaan

dan menjalankan prosedur audit, dengan tidak cepat puas dengan bukti audit yang kurang persuasif yang hanya didasarkan pada kepercayaan bahwa manajemen dan pihak terkait bersikap jujur dan mempunyai integritas.

Sementara dalam penelitian Efendy (2010:62) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian terhadap variabel independensi yang dilakukan pada aparat Inspektorat Kota Gorontalo tidak berhasil dibuktikan, diduga karena independensi aparat Inspektorat Kota Gorontalo masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dimana atasan/pemimpin tertinggi di daerah mempunyai wewenang atas aparat internal di wilayahnya. Sehingga sering adanya perputaran pegawai atau mutasi satuan kerja perangkat daerah yang berimbas pada tidak independennya suatu pemeriksaan. Bahkan tidak jarang aparat mendapatkan fasilitas dari *auditee*, yang dapat menimbulkan hilangnya independensi dan kepercayaan terhadap kualitas audit tersebut.

Sebagaimana yang dikutip oleh Aulia (2013), penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2007) mengenai skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan menyebutkan auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis identifikasi (*identifikasi-based trust*) jika diberi penafsiran resiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis kalkulus (*calculus-based trust*) meskipun diberi penafsiran resiko kecurangan yang rendah akan menunjukkan skeptisisme profesional yang tidak berbeda dengan auditor yang diberi penafsiran resiko yang tinggi. Dengan kata lain, auditor yang mengalami disonansi kognitif cenderung memilih bersikap sesuai petunjuk dari atasannya, sedangkan auditor yang tidak mengalami disonansi

kognitif, tinggi rendahnya tingkat penafsiran resiko kecurangan tidak mempengaruhi skeptisismenya. Auditor tetap dapat mempertahankan sikap skeptisisme profesional sesuai dengan norma dan tingkat kepercayaan terhadap klien.

Selain itu Kurniawati (2012) mencoba meneliti kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu dengan menggunakan model regresi logistik untuk menemukan faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasilnya yaitu ditemukan bukti bahwa pertumbuhan tinggi dari perusahaan, kerugian laba, kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, dan transaksi pihak istimewa berpengaruh secara positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Dalam penelitian Pertiwi (2010:104) memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendeteksian kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Hal tersebut dikarenakan hanya sebesar 31,1% (18 dari 58 orang) yang berpendidikan akuntansi sehingga masih banyak auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang belum mengetahui secara lebih mendalam mengenai *fraud*, termasuk penyebab *fraud*, jenis-jenis *fraud*, karakteristik *fraud*, teknik-teknik *fraud* yang biasa terjadi. Begitu juga dengan kemampuan berfikir auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, peneliti menyimpulkan variabel kemampuan berfikir tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendeteksian kecurangan. Tidak berpengaruhnya kemampuan berfikir auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan

dikarenakan auditor belum mampu beradaptasi dan menghindari tekanan yang dapat mengganggu obyektivitas auditor, sehingga auditor belum mampu mendeteksi kecurangan.

Efendy (2010), yang meneliti pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah menyebutkan kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan independensi tidak berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan aparatur masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan acapkali aparatur mendapat fasilitas dari pihak yang di audit, sehingga independensi menjadi berkurang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunintasari (2010:87) menyebutkan sikap independensi dan profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud memberikan dampak yang positif bagi perusahaan atau manajemen maupun bagi auditor dalam melakukan tugasnya. Hal ini memberikan pandangan bagi masyarakat bahwa tidak hanya auditor eksternal saja yang memiliki sikap independensi walaupun auditor internal bekerja pada perusahaan atau manajemen tersebut.

Menyadari pentingnya peran auditor dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Meskipun auditor tidak dapat menjamin suatu kecurangan (*fraud*) tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya untuk mendeteksi *fraud* sekaligus memberi solusi jitu kepada manajemen mencegah terjadinya kecurangan. Jika ditemukan suatu indikasi kecurangan (*fraud*) dalam suatu institusi/organisasi atau manajemen maka pihak-pihak terkait

dalam organisasi atau manajemen harus melaporkan dan merekomendasikan dilakukan investigasi untuk menyelidiki kecurangan (*fraud*) tersebut. Audit investigatif merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan (*fraud*).

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor Investigatif terhadap Pendeteksian Kecurangan”** (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan serta diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis sebagai dasar dalam penulisan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi auditor investigatif berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
2. Apakah pengalaman auditor investigatif berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
3. Apakah independensi auditor investigatif berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?
4. Apakah skeptisisme profesional auditor investigatif berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi auditor investigatif Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagai masukan yang berpengaruh bagi auditor khususnya dalam audit investigatif. Serta bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional yang dimiliki auditor investigatif tersebut berpengaruh terhadap pendeteksian adanya kecurangan.

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi auditor investigatif terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh pengalaman auditor investigatif terhadap pendeteksian kecurangan.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh independensi auditor investigatif terhadap pendeteksian kecurangan.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh skeptisisme profesional auditor investigatif terhadap pendeteksian kecurangan.

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kegunaan Teoretis

Pengembangan ilmu pengetahuan:

1. dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ilmu pengauditan,

2. sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.3.2. Kegunaan Praktis

Bagi lembaga-lembaga yang terkait:

1. dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigatif dalam kemampuannya untuk mendeteksi adanya suatu kecurangan dalam pelaksanaan prosedur audit,
2. memberikan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar penulisan yang dilakukan menjadi lebih terarah. Tulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu pendahuluan, landasan teori, tinjauan kajian terdahulu, pengembangan hipotesis, metode penelitian, analisis data, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan saran.

Pada bab satu terdapat penjelasan mengenai latar belakang penelitian dilakukan. Setelah penjelasan mengenai latar belakang masalah dapat dirumuskan pada subbab perumusan masalah. Setelah masalah dirumuskan maka dapat dijelaskan mengenai tujuan penelitian. Penjelasan mengenai manfaat penelitian dijabarkan setelah tujuan penelitian ditetapkan.

Pada bab dua dijelaskan mengenai teori yang mendasari penelitian digunakan untuk membangun hipotesis. Hipotesis yang dibangun didukung dengan hasil penelitian terdahulu. Teori yang mendasari penelitian, hipotesis yang dibangun serta hasil penelitian terdahulu dijelaskan pada bab dua yaitu : landasan teori, tinjauan kajian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Pada bab tiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penjelasan pada bab ini diawali dengan penentuan responden dan teknik pengambilan sampel. Setelah sampel ditentukan maka ditetapkan metode pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih lanjut dalam operasionalisasi variabel yang menjelaskan mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel. Selanjutnya penjelasan mengenai metode analisis data yang menjelaskan model analisis data yang digunakan serta pengujian yang dilakukan. Pengujian tersebut baik terhadap data yang digunakan maupun terhadap metode analisis data.

Pada bab empat disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian dijelaskan hasil analisis pengujian hipotesis dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Pada sub bahagian pembahasan ini, diuraikan secara lebih luas dan mendalam tentang berbagai justifikasi atas hasil hipotesis yang diterima dan sebaliknya memberikan berbagai argumen atau kenapa hipotesis ditolak. Pembahasan ini menggunakan dasar berupa: landasan teoritis, tinjauan kajian terdahulu, kondisi lingkungan saat penelitian dilakukan serta logika rasionalitas. Dan terakhir juga dijelaskan beberapa keterbatasan kalau ada, implikasi hasil penelitian serta beberapa saran untuk kajian lanjut.

Bab lima merupakan bab penutup, yang pada dasarnya adalah berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran-saran untuk kajian lanjut.